

Perekonomian indonesia pada masa orde lama : antara kebijakan ekonomi dan stabilitas sosial

Syazani Mumtaz Azmy Effendy

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 230102110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Orde Lama, kebijakan ekonomi, stabilitas sosial, konflik ideologi, perekonomian Indonesia.

Keywords:

Old Order, economic policy, social stability, ideological conflict, Indonesian economy.

ABSTRAK

Disaat masa Orde Lama anatara tahun (1945-1966), bangsa muda Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan ketidakstabilan politik dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah saat itu dipengaruhi oleh upaya membangun negara yang baru merdeka dan memperkuat identitas nasional. Di tengah kekayaan alam yang melimpah tanpa diimbangi sumber daya manusia yang mumpuni akan menyebabkan sistem perekonomian yang kurang stabil akan tetapi pada masa orde lama kebijakan ekonomi indonesia berfokus pada industrialisasi dan nasionalisasi perusahaan asing, serta menciptakan kemandirian ekonomi. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sering kali dilakukan tanpa perencanaan yang matang, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Salah satu dampak signifikan adalah inflasi yang melonjak, kelangkaan barang, serta defisit anggaran yang mengganggu kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, tekanan politik dan sosial, termasuk konflik ideologi yang dibuat birokrat antara kelompok komunis, nasionalis, dan Islam, turut memengaruhi stabilitas negara. Sehingga artikel ini membahas bagaimana kebijakan ekonomi Orde Lama berinteraksi dengan dinamika sosial-politik dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kajian-kajian ini, sehingga tujuan dari artikel ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Orde Lama dan upaya menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan yang dihadapi bangsa indonesia pada masa orde lama.

ABSTRACT

During the Old Order period (1945-1966), young Indonesians were faced with various challenges and political instability in economic development. The economic policies implemented by the government at that time were influenced by efforts to build a newly independent country and strengthen national identity. In the midst of abundant natural resources without being balanced by qualified human resources, the economic system will be less stable. However, during the Old Order era, Indonesia's economic policies focused on industrialization and nationalization of foreign companies, as well as creating economic independence. However, these policies were often carried out without careful planning, which led to an imbalance between economic needs and social stability. One significant impact was soaring inflation, scarcity of goods, and budget deficits that disrupted people's welfare. On the other hand, political and social pressures, including ideological conflicts created by bureaucrats between communist, nationalist and Islamic groups, also affected the stability of the country. This article therefore discusses how the economic policies of the Old Order interacted with socio-political dynamics and their impact on the Indonesian economy. With these studies, the aim of this article is to provide a deeper understanding of the relationship between the economic policies adopted by the Old Order government and the efforts to maintain social stability amidst the economic crisis.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Setelah kemerdekaan yang didapatkan oleh para pejuang-pejuang bangsa, (Rabani et al., 2022) Negara Indonesia dihadapi dengan tantangan ekonomi dan stabilisasi politik yang masih belum tertata dengan rapi, peralihan dari masa kolonialisme membuat bangsa Indonesia masih ahrus banyak belajar pengalaman dari bangsa sendiri atau dari bangsa luar. Semua orang tahu bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal termasuk kondisi alam (seperti iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM), kondisi awal ekonomi, tatanan sosial, budaya, sistem politik dan ekonomi yang diterapkan, dan peran aktif pemerintah. Namun demikian, sejarah telah menunjukkan bahwa komponen internal lebih berpengaruh daripada komponen eksternal dalam menentukan pola dan kecepatan kemajuan ekonomi suatu negara. Banyak negara yang survive dan bahkan muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi global karena kondisi internalnya solid, walaupun kondisi eksternal tidak terlalu/selalu mendukung.

Masa Orde Lama, yang merujuk pada pemerintahan Presiden Soekarno dari awal kemerdekaan 1945 hingga 1966, merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. (Dianti, 2017) Kebijakan ekonomi yang diadopsi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara di tengah pergolakan politik dan sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, kemajuan ekonomi Indonesia di masa ini tidak dapat dilepaskan dari perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan, memperkuat identitas bangsa, dan membangun fondasi sosial-politik untuk negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Sebagai Negara yang muda Indonesia dihadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonominya di awal kemerdekaan. Perang kemerdekaan atau bisa disebut agresi militer 1 dan 2 Belanda, yang berlangsung dari 1945 hingga 1949, merusak infrastruktur ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi yang diwariskan dari penjajah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lebih menguntungkan kepentingan kolonial. Sumber daya manusia yang belum terdidik di bidang ekonomi dan pemerintahan yang tidak stabil memperparah kondisi ini.

Pada masa Orde Lama, (Adolph, 2016) Presiden Soekarno dan pemimpin lainnya berupaya menstabilkan ekonomi dan memperkuat jati diri bangsa melalui kebijakan nasionalisasi aset Belanda, dengan harapan pemerintah bisa mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Namun, langkah ini menghadapi tantangan seperti kurangnya modal, teknologi, dan tenaga kerja terampil. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pro-rakyat melalui program pembangunan yang menekankan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Soekarno mendorong kemandirian ekonomi dengan konsep "berdikari", tetapi pelaksanaannya terhambat oleh ketidakstabilan politik, inflasi, dan kebijakan yang kurang terkoordinasi. Dengan merangkul berbagai perspektif ilmu ekonomi, sejarah dan ilmu sosial, artikel ini bertujuan untuk membongkar kompleksitas kebijakan orde lama dalam konteks kestabilan sosial. Melalui pendekatan ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi orde lama dapat membentuk dan mempengaruhi kestabilan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pandangan yang lebih lengkap dan mendalam terhadap dinamika kebijakan dalam situasi ekonomi global yang terus berubah.

Metode peneltian

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif. Metode kualitatif adalah proses metode yang didapatkan melalui informasi deskriptif dalam bentuk lisan, film documenter dan literatur tentang kebijakan-kebijakan orde lama dan pengaruh stabilitas sosial yang telah penulis amati. Penulis melakukan review terhadap beberapa literatur yang berkaitan, kemudian penulis bandingkan dengan dalil-dalil atau fakta yang penulis dapatkan.

Pembahasan

Pada awal kemerdekaan ekonomi Indonesia bergantung pada pertanian dan perkebunan, terutama ekspor karet, minyak kelapa sawit, kopi, dan teh. Sebagian besar produk ini dieksport untuk memenuhi kebutuhan Negara-negara Barat, sementara orang Indonesia sendiri hidup dalam kemiskinan. Pada saat itu, infrastruktur yang ada sebagian besar infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kolonial Belanda dan tidak didesain untuk membantu pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, kebijakan pemerintah menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama karena dampak pandemi global dan fluktuasi harga minyak global. Dalam hal ini, kenaikan harga BBM yang signifikan menyebabkan kenaikan harga yang lainnya secara otomatis.

Keputusan yang dibuat oleh DPR-RI ini sangat disayangkan dan menimbulkan masalah bagi masyarakat miskin di Indonesia. Banyak orang yang sudah bingung bagaimana mendapatkan uang, sekarang mereka juga kesulitan membeli bahan bakar minyak sebagai cara mereka bekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor transportasi umum seperti angkot dan tukang ojek, dll. Keputusan yang telah dibuat juga tidak sebanding dengan ekonomi rakyat Indonesia yang menengah ke bawah, yang merupakan alasan dari banyaknya demonstrasi saat ini dan dampak dari kenaikan harga BBM ini jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi juga, jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, otomatis harga bahan pangan ikut naik, inilah yang disebut inflasi. Maka dari itu ada beberapa ilmu sosial yang dapat dipakai.

Ekonomi Pada Masa Orde Lama

Sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno sangat membenci dasar-dasar pemikiran Barat, termasuk kapitalisme dan sistem ekonomi liberal. Dia percaya bahwa sistem ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia selama penjajahan Belanda, sehingga harus dibenci dan diusir dari Indonesia.(Damayanti, 2022) Soekarno berpendapat bahwa jika Indonesia ingin mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat yang berbasis kapitalisme-liberalisme, mereka harus menerapkan ideologi Marhaenisme, atau Marxisme. Namun, pada tahun 1959, konsep kapitalisme-liberalisme dihapus secara konstitusional ketika UUD 1945 kembali digunakan sebagai landasan sistem ekonomi nasional. Namun, Soekarno menggunakan sistem ekonomi komando di negara-negara komunis seperti Uni Soviet (yang sekarang dikenal sebagai Rusia), negara-negara Eropa Timur (yang sekarang dikenal sebagai negara-negara transisi), dan

China. Sistem ini memiliki kendali sepenuhnya atas semua keputusan dan rencana pertumbuhan ekonomi, termasuk industri yang akan dibangun, yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara umat beragama, sosialis, dan komunis.

Ketegangan antara kelompok Islam, Islam nasionalis, abangan, dan Kristen banyak terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga pemberontakan PKI pada tahun 1965. Ada ketegangan yang terlihat ketika dasar negara Republik Indonesia disusun, yang diakhiri dengan modus vivendi yang disebut Piagam Jakarta. Namun, kalimat ketujuh dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dihapus sehari setelah Indonesia merdeka. Ketegangan antara Islam dan Kristen mulai muncul pada saat ini. Aliran kepercayaan, juga dikenal sebagai "Kejawen", muncul pada tahun 1950-an dan menjadi sumber utama massa PKI. PKI adalah oposisi utama terhadap doktrin dan politik Islam. Ketika PKI gagal melakukan revolusi pada tahun 1965, banyak orang Islam membantu Angkatan Darat menumpas para pengikutnya. Akibatnya, banyak pengikut PKI yang abangan menjadi Kristen. Di antara abangan ini, konversi ke agama Kristen telah membawa kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi Islam untuk berpindah dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.

Selama periode orde lama (1945-1966), (Yohanis, 2023) Perekonomian Indonesia gagal, bahkan sangat buruk, disebabkan oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri, yang ditunjukkan oleh pemberontakan di beberapa wilayah, seperti Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1950-an, yang hampir menghancurkan ekonomi nasional. (Junaedi & Arsyad, 2018) Pada tahun 1950-an, indeks output agregat hanya meningkat 22,1% pada tahun 1953, sedangkan pertumbuhannya berkisar antara -1,9% pada tahun 1959 dan 5,8% pada tahun 1957. Pada tahun 1960-an, keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk, nyaris mengalami stagflasi pada tahun 1965-66 dengan pertumbuhan PDB hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Akibatnya, ekonomi Indonesia hancur menjelang akhir periode orde lama, juga didorong dengan adanya hyperinflasi mencapai 650% pada tahun 1966.

Ketidakstabilan politik di Indonesia selama masa kepemimpinan Soekarno berkontribusi pada keruntuhan perekonomian negara. Hal ini ditandai dengan pergantian kabinet yang terjadi sebanyak delapan kali selama periode demokrasi parlementer antara 1959 hingga 1965. Proses ini dimulai dengan Kabinet Hatta (Desember 1949 hingga September 1950), diikuti oleh Kabinet Natsir (September 1950 hingga Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 hingga Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 hingga Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953 hingga Juli 1955), Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955 hingga Maret 1956), Kabinet Ali II (April 1956 hingga Maret 1957), dan terakhir Kabinet Djuanda (Maret 1957 hingga Agustus 1959).

Kebijakan Ekonomi Orde Lama

Pada masa Orde Lama (1945–1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami beberapa fase penting yang didorong oleh ideologi politik dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun internasional. (Arifin et al., 2018) Berikut beberapa kebijakan ekonomi utama pada masa itu:

Ekonomi Benteng (1950-an)

Adanya kebijakan ini guna Mengurangi ketergantungan ekonomi pada Belanda dan perusahaan asing sehingga kebijakan ini dapat memperkuat pengusaha pribumi. Bentuk dari kebijakan ini tidak lain yaitu Pemerintah memberikan bantuan berupa kredit dan izin impor kepada pengusaha pribumi untuk mengendalikan perdagangan. Akan tetapi Kebijakan ini kurang berhasil karena banyak pengusaha pribumi yang tidak siap bersaing, sehingga hanya beberapa pengusaha yang mampu berkembang.

Nasionalisasi Perusahaan Asing (1957)

Pengambil alih kendali ekonomi dari tangan perusahaan asing yang banyak menyebar setelah kemerdekaan Indonesia , khususnya milik Belanda pemerintah malakukan nasionalisasi DeJavacheBanc menjadi bank Indonesia. Pengambilan kebijakan ini setelah terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda terkait masalah Irian Barat, pemerintah menasionalisasi berbagai perusahaan milik Belanda, seperti perusahaan perkebunan, perbankan, dan perusahaan lain. Meski nasionalisasi ini meningkatkan kendali negara atas perekonomian, tetapi banyak perusahaan yang diambil alih mengalami penurunan produktivitas karena kurangnya manajemen yang kompeten.

Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dalam system ini pemerintah kembali menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan konsep guided economy atau ekonomi terpimpin. Pemerintah mengambil peran yang sangat besar dalam perekonomian. Negara mengendalikan sektor-sektor vital seperti pertambangan, transportasi, komunikasi, dan perbankan. Swasta menjadi peran sekunder dalam perekonomian. Akan tetapi Implementasi ekonomi terpimpin ini menimbulkan masalah baru seperti inflasi yang sangat tinggi dan defisit anggaran yang memburuk.

Deklarasi Ekonomi (Dekon) 1963

Di tahun inilah ide nasionalis, komunis mulai muncul dengan menetapkan kerangka ekonomi yang berbasis pada sosialisme ala Indonesia, dengan tujuan memperkuat ekonomi negara. Kebijakan yang Menekankan pentingnya ekonomi terpimpin dengan perencanaan ekonomi yang kuat, mengarahkan semua sektor perekonomian di bawah kontrol negara. Sehingga dampak yang didapatkan dari Kebijakan ini gagal mengatasi masalah ekonomi yang semakin parah, termasuk inflasi, kelangkaan barang, dan merosotnya nilai rupiah.

Pengendalian Inflasi Tinggi dan Krisis Ekonomi

Pada awal 1960-an, inflasi di Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi, hingga mencapai 600% pada 1965. Ketidakstabilan ekonomi ini disebabkan oleh kebijakan yang tidak efektif, pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk proyek-proyek mercusuar dan pembiayaan militer. Semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan sosialisme Presiden Soekarno memengaruhi kebijakan ekonomi Orde Lama. Namun, krisis ekonomi terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang buruk serta ketidakstabilan politik, yang menyebabkan Orde Lama runtuh pada tahun 1966.

Kondisi Politik Orde Lama

Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer yang mengedepankan partai politik. Namun, ketidakstabilan politik mulai terjadi karena banyaknya partai dan pertikaian ideologi di antara mereka, termasuk antara partai nasionalis, Islamis, dan komunis. Pemerintahan sering berganti akibat ketidakmampuan kabinet untuk mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. (פרידקין צ. ז'ק ע., 2013) Di awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan adalah Presidensil, yang dibangun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan presiden berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mentri berfungsi sebagai pembantu presiden. Menteri adalah pembantu presiden (pemerintah), yang dipilih dan diberhentikan oleh presiden, sehingga presiden bertanggung jawab kepada menteri. Dengan demikian, untuk Departemen dan kementerian dibentuk untuk melengkapi pemerintahan Indonesia. Presiden seharusnya bertanggung jawab untuk membentuk kementerian, tetapi untuk negara Indonesia yang baru saja memperoleh kemerdekaannya membentuk Departemen dan sebuah kelompok yang sangat kecil dipilih untuk menyusun Kementerian Negara (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo.

Akhirnya, (Inkom, n.d.) setelah sidang PPKI 19 Agustus 1945, Kabinet Presidensil (Kabinet RI 1) dibentuk pada 12 September 1946. Ini memiliki 12 departemen dan 4 menteri negara. Untuk saat ini, Untuk menyempurnakan pemerintahan, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 propinsi. dengan dua wilayah khusus dengan gubernur masing-masing yang bertanggung jawab untuk pengambilan dan pelaksanaan keputusan di daerah. Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan parlemen dan mengembalikan konstitusi 1945, menandai berakhirnya sistem parlementer. Ia menetapkan sistem Demokrasi Terpimpin yang lebih otoriter, di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Dalam periode ini, Soekarno mengedepankan ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme dalam kebijakan politiknya. Sehingga terjadi Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan membawa Indonesia menuju krisis. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang memicu konflik berdarah dan mengarah pada pembantaian terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Ketegangan ini menjadi alasan bagi militer, di bawah pimpinan Jenderal Suharto, untuk mengambil alih kekuasaan, yang akhirnya mengakhiri masa Orde Lama dan membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru pada tahun 1966.

Ketidakstabilan Sosial Orde Lama

Terjadinya gejolak politik dan pertikaian ideologi menyebabkan Ketidakstabilan sosial yang terjadi pada orde lama di Indonesia, (Asiva Noor Rachmayani, 2015) sehingga kondisi sosial masyarakat pada tahun 1945-1966 sangat kompleks dan beragam.

1. Pertentangan Ideologi: Terdapat konflik antara ideologi sosialisme, komunisme, dan nasionalisme. Partai-partai politik berjuang untuk mendapatkan pengaruh, menciptakan ketegangan sosial.
2. Ekonomi yang Lemah: Pasca-perang kemerdekaan, ekonomi Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk inflasi tinggi, kemiskinan, dan kurangnya investasi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.

3. Gerakan Sosial dan Politik: Banyak kelompok masyarakat, termasuk buruh dan petani, mulai mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang seringkali berujung pada konflik dan kekerasan.
4. Konflik Antara Militer dan Sipil: Ketegangan antara kekuatan militer dan pemerintahan sipil menciptakan ketidakpastian politik. Militer mulai berperan lebih aktif dalam politik, yang menambah kompleksitas situasi.
5. Pemberontakan Daerah: Beberapa daerah, seperti PRRI dan Permesta, mengalami pemberontakan yang menuntut otonomi lebih besar dan penanganan masalah lokal yang lebih baik.
6. Dinamika Sosial: Perubahan sosial yang cepat, termasuk urbanisasi dan pendidikan yang meningkat, membawa tuntutan baru yang sering kali tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah.
7. Kekerasan dan Repression: Di akhir periode Orde Lama, terdapat peningkatan kekerasan politik, termasuk penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai komunis.

Bisa dilihat dari kondisi social yang ada di Indonesia pada masa orde lama. Kondisi-kondisi seperti ini disebabkan ketidakstabilan ekonomi politik yang ada di Indonesia, dampak dari kebijakan yang kurang memerhatikan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga terjadinya inflasi yang tinggi dan defisit anggaran.

Kesimpulan dan Saran

Masa Orde Lama Indonesia (1945-1966) adalah masa yang penuh dengan masalah ekonomi dan politik. Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bawah Presiden Soekarno bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa, tetapi banyak dari upaya tersebut tidak berhasil. Kebijakan nasionalisasi, ekonomi terpimpin, dan berbagai upaya untuk menurunkan ketergantungan pada kekuatan asing sering menghadapi tantangan besar, seperti manajemen yang baik, modal, dan teknologi. Kondisi ekonomi semakin memburuk sebagai akibat dari ketidakstabilan politik yang ditandai dengan pergantian kabinet yang sering, konflik ideologi, dan pemberontakan daerah. Pada akhirnya, ini menyebabkan inflasi tinggi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konflik ideologi, ketidakpastian ekonomi, dan ketegangan sosial memperparah keadaan, memicu kekerasan politik pada akhir periode tersebut.

Maka diperlukan membangun institusi yang kuat dan transparan untuk mengelola kebijakan ekonomi dan politik dengan baik. Kebijakan ekonomi juga sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berbasis pada analisis yang mendalam agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga peningkatan SDM serta dialog antar ideology, supaya tercipta masyarakat yang harmonis.

Daftar Pustaka

- Adolph, R. (2016). EKONOMI INDONESIA. 1-23.
- Arifin, M. Z., Jumadi, J., & Najamuddin, N. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973. *Jurnal*

- Pattingalloang, 5(3), 101–111.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *indonesia ekonomi*. 6.
- Damayanti, W. (2022). Eksistensi Gerakan Mahasiswa Tahun 1966 Sebagai Upaya Tumbangkan Kepemimpinan Soekarno. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 24–35. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.21063>
- Dianti, Y. (2017). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- inkom. (n.d.).
- Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Utang terhadap Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia Periode 1949-2017. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i1.277>
- Rabani, L. O., Husain, S. B., & Khusyairi, J. A. (2022). Spices, Colonialism, and the Growth of New Economic Centers on the East Coast of East Sulawesi, 1620s—1920s. *Mozaik Humaniora*, 22(2), 219–230. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v22i2.32069>
- Yohanis. (2023). Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Kelurahan Banuan Nan Xx. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1.66>
- ע. ז'קן צ. (2013). *ekonomi indon*.